



SALINAN

BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERGESERAN KETIGA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Landak Nomor 900.1/723/II-BPKAD tentang Pergeseran Ketiga APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6884);

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
30. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);

35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
42. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
45. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
46. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
49. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121);
50. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);

51. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
52. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Peningkatan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758);
53. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
54. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);
55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
56. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
57. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2023 tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6);
65. Peraturan Bupati Landak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 728);
66. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 734);
67. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 41);

68. Peraturan Bupati Landak Nomor 23 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 23);
69. Peraturan Bupati Landak Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 57);
70. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN KETIGA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pergeseran Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp 1.403.883.855.129,00
  - b. Bertambah / (berkurang) Rp 11.863.250.367,00Jumlah Pendapatan Daerah setelah pergeseran Rp 1.415.747.105.496,00
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp 1.437.116.577.846,00
  - b. Bertambah / (berkurang) Rp 16.030.527.650,00Jumlah Belanja Daerah setelah pergeseran Rp 1.453.147.105.496,00  
Surplus/Defisit setelah pergeseran ( Rp 37.400.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	40.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah pergeseran			Rp 40.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	6.767.277.283,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp)	4.167.277.283,00)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah pergeseran			Rp 2.600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah pergeseran			Rp 37.400.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN			Rp 0,00

Pasal 2

Pergeseran Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. BUPATI LANDAK,  
TTD  
SAMUEL

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

TTD  
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH

NIP. 19661128 199402 2 001



**KABUPATEN LANDAK**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100.684.475.660,00</b>	<b>101.547.726.027,00</b>	<b>863.250.367,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	54.170.000.000,00	54.170.000.000,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	180.000.000,00	0,00	-180.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.620.000.000,00	0,00	-2.620.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	130.000.000,00	0,00	-130.000.000,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	130.000.000,00	0,00	-130.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.155.000.000,00	0,00	-2.155.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.155.000.000,00	0,00	-2.155.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	32.000.000,00	0,00	-32.000.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.240.000,00	0,00	-3.240.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.240.000,00	0,00	-3.240.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	23.600.000,00	0,00	-23.600.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	23.600.000,00	0,00	-23.600.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.160.000,00	0,00	-5.160.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.160.000,00	0,00	-5.160.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penyerangan Jalan	8.300.000.000,00	0,00	-8.300.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penyerangan Jalan Sumber Lain	8.300.000.000,00	0,00	-8.300.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penyerangan Jalan Sumber Lain	8.300.000.000,00	0,00	-8.300.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37.000.000.000,00	37.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberan Hak Baru	33.800.000.000,00	33.800.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberan Hak Baru	33.800.000.000,00	33.800.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	11.145.000.000,00	11.145.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	0,00	2.620.000.000,00	2.620.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	0,00	465.000.000,00	465.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00	2.155.000.000,00	2.155.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	0,00	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain	0,00	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Perediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.460.440.000,00	3.460.440.000,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.879.360.000,00	2.879.360.000,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	575.000.000,00	0,00	-575.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	575.000.000,00	0,00	-575.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.156.320.000,00	1.156.320.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.156.320.000,00	1.156.320.000,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	548.040.000,00	548.040.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	71.040.000,00	71.040.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	140.760.000,00	140.760.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kos	336.240.000,00	336.240.000,00	0,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	0,00	575.000.000,00	575.000.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	0,00	575.000.000,00	575.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	323.080.000,00	323.080.000,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	43.680.000,00	43.680.000,00	0,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	43.680.000,00	43.680.000,00	0,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	95.000.000,00	0,00	-95.000.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Temak	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.167.277.283,00	7.030.527.650,00	863.250.367,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.167.277.283,00	7.030.527.650,00	863.250.367,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.167.277.283,00	7.030.527.650,00	863.250.367,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.167.277.283,00	7.030.527.650,00	863.250.367,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.886.758.377,00	36.886.758.377,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	4.786.758.377,00	4.786.758.377,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.786.758.377,00	4.786.758.377,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.786.758.377,00	4.786.758.377,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.17.02	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.17.02.0001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.274.099.379.469,00</b>	<b>1.285.099.379.469,00</b>	<b>11.000.000.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemanentan Pusat	1.233.073.354.000,00	1.233.073.354.000,00	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.072.890.498.000,00	1.072.890.498.000,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	44.651.170.000,00	44.651.170.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	13.747.189.000,00	13.747.189.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.633.605.000,00	4.633.605.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	22.287.000,00	22.287.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dari Batubara-Royalty	10.862.952.000,00	10.862.952.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	310.965.000,00	310.965.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	13.953.674.000,00	13.953.674.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.120.498.000,00	1.120.498.000,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	725.109.853.000,00	725.109.853.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	556.588.624.000,00	556.588.624.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	34.383.842.000,00	34.383.842.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	93.492.353.000,00	93.492.353.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	14.917.130.000,00	14.917.130.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	25.727.804.000,00	25.727.804.000,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	117.337.488.000,00	117.337.488.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	260.907.000,00	260.907.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.012.250.000,00	8.012.250.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.031.232.000,00	6.031.232.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	201.128.000,00	201.128.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	20.820.000.000,00	20.820.000.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.390.000.000,00	1.390.000.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jajan-Reguler-Jajan	25.896.800.000,00	25.896.800.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jajan-Penugasan-Jajan	7.164.783.000,00	7.164.783.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	14.534.438.000,00	14.534.438.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	9.879.830.000,00	9.879.830.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.441.409.000,00	5.441.409.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	2.191.945.000,00	2.191.945.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	15.412.766.000,00	15.412.766.000,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	185.791.987.000,00	185.791.987.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	47.566.506.000,00	47.566.506.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.681.623.000,00	1.681.623.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	22.552.768.000,00	22.552.768.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.435.374.000,00	5.435.374.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Kelangkaan Pangan dan Pertanian	3.324.975.000,00	3.324.975.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	404.106.000,00	404.106.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BCSP-BOS Reguler	72.955.880.000,00	72.955.880.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BCSP-BOS Kinerja	2.165.000.000,00	2.165.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BCSP-BOP PAUD Reguler	4.576.770.000,00	4.576.770.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BCSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BCSP-BOP Kesetaraan Reguler	473.200.000,00	473.200.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.387.447.000,00	5.387.447.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	19.238.338.000,00	19.238.338.000,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	151.802.945.000,00	151.802.945.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	151.802.945.000,00	151.802.945.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	151.802.945.000,00	151.802.945.000,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	8.379.911.000,00	8.379.911.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	8.379.911.000,00	8.379.911.000,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	8.379.911.000,00	8.379.911.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.026.025.469,00	52.026.025.469,00	11.000.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	41.026.025.469,00	41.026.025.469,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41.026.025.469,00	41.026.025.469,00	0,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.098.274.532,00	11.098.274.532,00	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.453.397.444,00	17.453.397.444,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.784.628.201,00	8.784.628.201,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	612.761.903,00	612.761.903,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.076.963.389,00	3.076.963.389,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dan Pemerintah Provinsi	0,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dan Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>29.100.000.000,00</b>	<b>29.100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00	0,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00	0,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00	0,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.403.883.855.129,00</b>	<b>1.415.747.105.496,00</b>	<b>11.863.250.367,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.011.482.816.626,00</b>	<b>1.025.862.416.865,00</b>	<b>14.399.600.239,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	576.678.689.104,00	563.567.450.143,00	-7.111.238.961,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	365.440.432.817,00	358.293.733.856,00	-7.146.698.961,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	282.121.053.709,00	264.185.724.656,00	-17.935.329.053,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	211.475.076.358,00	211.475.076.358,00	0,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	70.645.977.351,00	52.710.648.298,00	-17.935.329.053,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.421.657.251,00	24.962.837.240,00	3.541.179.989,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.888.194.600,00	18.888.194.600,00	0,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.533.462.651,00	6.074.642.640,00	3.541.179.989,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.264.363.650,00	5.264.363.650,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.264.363.650,00	5.264.363.650,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.811.983.630,00	17.510.813.630,00	1.698.830.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.811.983.630,00	17.510.813.630,00	1.698.830.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.805.496.493,00	7.134.289.118,00	1.528.792.625,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.884.923.093,00	3.884.923.093,00	0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.720.573.400,00	3.249.366.025,00	1.528.792.625,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.968.926.888,00	16.385.575.046,00	2.416.648.158,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.069.954.995,00	12.069.954.995,00	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.898.971.893,00	4.315.620.051,00	2.416.648.158,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	750.637.597,00	750.637.597,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	750.637.597,00	750.637.597,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.575.557,00	4.287.225,00	711.668,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.126.693,00	3.126.693,00	0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	448.864,00	1.160.532,00	711.668,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	18.201.463.241,00	18.416.655.499,00	1.215.192.258,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.464.533.943,00	16.464.533.943,00	0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.736.929.298,00	2.952.121.556,00	1.215.192.258,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	572.819.423,00	633.559.360,00	60.739.937,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	507.016.429,00	507.016.429,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	65.802.994,00	126.542.931,00	60.739.937,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.718.455.376,00	1.900.739.154,00	182.283.776,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.521.054.788,00	1.521.054.788,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	197.400.590,00	379.684.366,00	182.283.776,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	144.251.681,00	144.251.681,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	0,00	144.251.681,00	144.251.681,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	98.195.671.287,00	98.195.671.287,00	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	91.320.318.843,00	57.946.986.199,00	-33.373.332.644,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	81.040.591.319,00	50.969.730.973,00	-30.070.860.346,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	10.279.727.524,00	6.977.255.226,00	-3.302.472.298,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.772.923.031,00	38.146.255.675,00	33.373.332.644,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.759.723.515,00	33.842.195.900,00	30.082.472.385,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1.013.199.516,00	4.304.059.775,00	3.290.860.259,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.102.429.413,00	2.102.429.413,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.642.616.725,00	1.642.616.725,00	0,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	459.812.688,00	459.812.688,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	91.350.979.000,00	91.386.439.000,00	35.460.000,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.708.500.000,00	2.708.500.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	131.000.000,00	0,00	-131.000.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	415.000.000,00	0,00	-415.000.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	650.000,00	0,00	-650.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	557.250.000,00	557.250.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	173.022.000,00	173.022.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	28.750.000,00	0,00	-28.750.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	57.816.000,00	57.816.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	27.402.000,00	27.402.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2.184.000,00	0,00	-2.184.000,00
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	250.000,00	250.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	720.000,00	0,00	-720.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	750.000,00	0,00	-750.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.750.000,00	0,00	-4.750.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0034	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	0,00	28.750.000,00	28.750.000,00
5.1.01.03.02.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	2.184.000,00	2.184.000,00
5.1.01.03.02.0040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00	720.000,00	720.000,00
5.1.01.03.02.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	0,00	750.000,00	750.000,00
5.1.01.03.02.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00
5.1.01.03.02.0044	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	47.566.506.000,00	47.566.506.000,00	0,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	47.566.506.000,00	47.566.506.000,00	0,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	22.552.768.000,00	22.552.768.000,00	0,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	22.552.768.000,00	22.552.768.000,00	0,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.681.623.000,00	1.681.623.000,00	0,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.681.623.000,00	1.681.623.000,00	0,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	15.921.100.000,00	15.921.100.000,00	0,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	15.921.100.000,00	15.921.100.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	747.460.000,00	782.920.000,00	35.460.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	747.460.000,00	782.920.000,00	35.460.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.077.406.000,00	21.077.406.000,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	805.980.000,00	805.980.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	805.980.000,00	805.980.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	137.309.200,00	137.309.200,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	137.309.200,00	137.309.200,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	119.545.200,00	119.545.200,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	119.545.200,00	119.545.200,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	69.426.000,00	69.426.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	69.426.000,00	69.426.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.168.671.000,00	1.168.671.000,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.168.671.000,00	1.168.671.000,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.567.500.000,00	4.567.500.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.567.500.000,00	4.567.500.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	105.916.112,00	105.916.112,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	105.916.112,00	105.916.112,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.022.758.488,00	7.022.758.488,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	73.318.488,00	73.318.488,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.942.000.000,00	6.942.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.568.000.000,00	5.568.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.568.000.000,00	5.568.000.000,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	279.300.000,00	279.300.000,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	279.300.000,00	279.300.000,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penenanaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	614.200.000,00	614.200.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	214.200.000,00	214.200.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	214.200.000,00	214.200.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.003.438.120,00	402.814.277.320,00	20.810.839.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang	146.001.886.142,00	165.781.982.580,00	19.780.096.438,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	145.919.855.142,00	165.699.951.580,00	19.780.096.438,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	450.910.386,00	450.910.386,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	626.000,00	626.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.687.876.708,00	5.022.185.908,00	1.334.309.200,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	399.609.582,00	407.958.582,00	8.349.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	97.261.564,00	97.261.564,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan	13.038.000,00	46.484.500,00	33.446.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	671.494.400,00	638.344.600,00	-33.149.800,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.516.964.000,00	354.469.600,00	-1.162.494.400,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	101.024.600,00	101.024.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.269.971.727,00	2.811.982.627,00	542.010.900,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.693.612.504,00	3.229.752.904,00	536.140.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.492.927.238,00	6.839.509.107,00	346.581.877,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	571.407.646,00	791.295.146,00	219.887.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.738.726.100,00	2.250.975.700,00	512.250.600,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Parabol Kantor	230.233.600,00	232.540.000,00	2.306.400,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	406.608.443,00	626.455.443,00	218.847.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	221.446.200,00	238.353.600,00	16.907.400,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata	96.245.000,00	96.245.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.390.119.711,00	13.349.210.932,00	-40.908.779,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.489.569.224,00	9.869.004.924,00	379.436.700,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	44.264.200,00	62.281.200,00	18.017.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	70.896.951.156,00	86.399.522.796,00	15.502.571.640,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.840.318.083,00	3.434.560.683,00	594.242.600,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	178.336.800,00	202.481.200,00	24.144.400,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3.978.880.000,00	3.978.880.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	7.149.500,00	2.755.500,00	-4.394.000,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	987.200,00	987.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.327.734.680,00	21.058.339.780,00	730.605.100,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.197.348.798,00	1.197.348.798,00	0,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	48.913.400,00	48.913.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	121.224.000,00	121.224.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	115.680.000,00	115.680.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	482.250.200,00	482.250.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	718.690.300,00	718.690.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	41.484.000,00	41.484.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	58.602.400,00	58.602.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bergkel	90.503.000,00	90.503.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	231.856.000,00	231.856.000,00	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.425.200,00	2.425.200,00	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	2.425.200,00	2.425.200,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	79.605.800,00	79.605.800,00	0,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	369.400,00	369.400,00	0,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	486.400,00	486.400,00	0,00
5.1.02.01.04.0721	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	92.593.135.581,00	92.810.449.531,00	217.313.950,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	52.776.471.804,00	51.361.800.818,00	-1.414.670.786,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.226.850.000,00	2.167.100.000,00	-59.750.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.375.750.000,00	735.750.000,00	-640.000.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pembekal Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	197.429.200,00	191.429.200,00	-6.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohanwan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	284.500.000,00	284.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.800.000.000,00	3.799.800.000,00	-2.000.200.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.894.896.000,00	9.025.496.000,00	5.130.600.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	34.775.000,00	34.775.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	58.961.800,00	58.961.800,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.529.432.000,00	1.405.832.000,00	-123.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.745.200.000,00	7.158.800.000,00	-1.586.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	49.300.000,00	787.100.000,00	737.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	260.414.000,00	1.144.144.800,00	883.730.800,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.820.567.800,00	1.192.058.890,00	-628.508.910,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.926.275.448,00	6.076.607.872,00	150.332.424,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	726.000.000,00	1.067.600.000,00	341.600.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	111.200.000,00	370.400.000,00	259.200.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	109.202.600,00	109.202.600,00	0,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.683.000,00	10.683.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	371.399.700,00	371.399.700,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	18.784.800,00	18.784.800,00	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	41.754.400,00	41.754.400,00	0,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	40.608.600,00	40.608.600,00	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	9.565.700,00	9.565.700,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	178.346.000,00	178.346.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	595.188.400,00	595.188.400,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	337.931.950,00	337.931.950,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	12.343.900,00	12.343.900,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	112.722.700,00	112.722.700,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.892.510.806,00	4.827.803.306,00	-64.707.500,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	406.738.400,00	406.738.400,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.044.079.400,00	2.297.557.800,00	253.478.400,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	63.834.700,00	63.834.700,00	0,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0,00	141.254.000,00	141.254.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	284.605.300,00	284.605.300,00	0,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	302.112.400,00	302.112.400,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.920.000.000,00	744.000.000,00	-1.176.000.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	410.227.600,00	410.227.600,00	0,00
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	6.327.500.000,00	3.300.000.000,00	-3.027.500.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.754.763.541,00	27.619.189.377,00	864.425.836,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.845.581.430,00	1.845.581.430,00	0,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	22.736.607.000,00	22.736.607.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	843.571.752,00	1.614.448.572,00	770.876.820,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	655.120.631,00	697.319.955,00	42.199.324,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	253.882.728,00	305.232.420,00	51.349.692,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	6.380.600,00	6.380.600,00	0,00
5.1.02.02.03.0008	Belanja Sewa Tanah Basah	6.380.600,00	6.380.600,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.636.103.700,00	5.771.804.400,00	135.700.700,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.174.696.200,00	5.177.882.700,00	3.186.500,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	15.237.000,00	147.151.200,00	131.914.200,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	620.000,00	620.000,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	17.267.000,00	17.267.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	253.903.500,00	253.903.500,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.646.800.536,00	2.633.496.536,00	-13.304.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	413.536.580,00	461.409.580,00	47.871.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	445.334.400,00	445.334.400,00	0,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Administrasi	1.787.927.556,00	1.726.752.556,00	-61.175.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	54.235.100,00	54.235.100,00	0,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	54.235.100,00	54.235.100,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.472.352.500,00	1.816.535.700,00	344.183.200,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	56.683.200,00	56.683.200,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	14.871.300,00	279.871.300,00	265.000.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.457.481.200,00	1.457.481.200,00	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.755.600.000,00	1.755.600.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	166.100.000,00	166.100.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.589.500.000,00	1.589.500.000,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	237.480.000,00	237.480.000,00	0,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	237.480.000,00	237.480.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.252.948.000,00	1.553.927.000,00	300.979.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	865.000.000,00	1.058.000.000,00	193.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	387.948.000,00	495.927.000,00	107.979.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.409.221.872,00	5.121.936.572,00	712.714.700,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.386.047.045,00	4.096.546.245,00	710.499.200,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	86.466.600,00	86.466.600,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.931.757.545,00	1.931.757.545,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	42.838.100,00	42.838.100,00	0,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.253.600,00	4.253.600,00	0,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	132.097.800,00	132.097.800,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	218.318.500,00	218.318.500,00	0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	225.804.000,00	225.804.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	167.021.500,00	167.021.500,00	0,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32.596.800,00	32.596.800,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	121.618.400,00	121.618.400,00	0,00
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarsasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	21.268.600,00	21.268.600,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	364.974.400,00	1.075.473.600,00	710.499.200,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	34.846.000,00	34.846.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.185.200,00	2.185.200,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	536.773.327,00	536.773.327,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	359.699.400,00	359.699.400,00	0,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	20.851.128,00	20.851.128,00	0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	20.452.800,00	20.452.800,00	0,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	135.769.999,00	135.769.999,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	327.114.800,00	327.114.800,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	327.114.800,00	327.114.800,00	0,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	159.286.700,00	161.502.200,00	2.215.500,00
5.1.02.03.05.0045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya	159.286.700,00	161.502.200,00	2.215.500,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	38.898.814.525,00	38.872.808.637,00	-26.005.888,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.898.814.525,00	38.872.808.637,00	-26.005.888,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.624.255.482,00	17.017.972.682,00	393.717.200,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	5.821.053.342,00	4.917.044.467,00	-904.008.875,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.315.284.118,00	11.161.309.419,00	-153.974.697,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.408.648.585,00	4.472.671.053,00	64.022.468,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	729.573.000,00	1.303.811.016,00	574.238.016,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.944.500.000,00	4.071.220.000,00	126.720.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.402.500.000,00	3.402.500.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3.260.000.000,00	3.260.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Dibankan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	542.000.000,00	668.720.000,00	126.720.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Dibankan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	126.720.000,00	126.720.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Ditirikan kepada Masyarakat	542.000.000,00	542.000.000,00	0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	70.955.880.000,00	70.955.880.000,00	0,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	70.955.880.000,00	70.955.880.000,00	0,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	70.955.880.000,00	70.955.880.000,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.200.000.000,00	25.200.000.000,00	0,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.200.000.000,00	25.200.000.000,00	0,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.200.000.000,00	25.200.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	52.700.689.402,00	53.400.689.402,00	700.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbantuan Hukum Indonesia	45.796.535.402,00	46.496.535.402,00	700.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	33.896.535.402,00	34.396.535.402,00	500.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	33.896.535.402,00	34.396.535.402,00	500.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.100.000.000,00	9.300.000.000,00	200.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.100.000.000,00	9.300.000.000,00	200.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.824.184.000,00	1.824.184.000,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.824.184.000,00	1.824.184.000,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.824.184.000,00	1.824.184.000,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	5.079.970.000,00	5.079.970.000,00	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.606.770.000,00	4.606.770.000,00	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.606.770.000,00	4.606.770.000,00	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	473.200.000,00	473.200.000,00	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	473.200.000,00	473.200.000,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1 06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1 06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1 06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>-183.455.111.386,00</b>	<b>187.160.060.251,00</b>	<b>3.704.948.865,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	60.460.000,00	60.460.000,00	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	60.460.000,00	60.460.000,00	0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	60.460.000,00	60.460.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	60.460.000,00	60.460.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.658.809.883,00	19.689.533.715,00	30.723.832,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6.520.400,00	6.520.400,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	6.520.400,00	6.520.400,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	3.318.600,00	3.318.600,00	0,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	1.636.400,00	1.636.400,00	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	1.565.400,00	1.565.400,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.211.167.900,00	4.211.167.900,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.211.167.900,00	4.211.167.900,00	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	591.870.000,00	591.870.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	649.857.000,00	649.857.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	444.347.900,00	444.347.900,00	0,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.525.093.000,00	2.525.093.000,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	254.847.120,00	254.847.120,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	254.847.120,00	254.847.120,00	0,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	254.847.120,00	254.847.120,00	0,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	3.695.400,00	10.045.700,00	6.350.300,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	3.695.400,00	10.045.700,00	6.350.300,00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	6.350.300,00	6.350.300,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	3.695.400,00	3.695.400,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	978.419.470,00	876.528.344,00	-101.891.126,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	976.605.670,00	874.714.544,00	-101.891.126,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	510.530.410,00	538.974.442,00	28.444.032,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	376.321.076,00	281.403.422,00	-94.917.654,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	89.754.184,00	54.336.680,00	-35.417.504,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.813.800,00	1.813.800,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1.813.800,00	1.813.800,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.487.624.000,00	2.494.762.359,00	7.238.359,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.379.338.000,00	2.386.576.359,00	7.238.359,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.317.235.500,00	2.317.235.500,00	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	62.102.500,00	69.340.859,00	7.238.359,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	108.186.000,00	108.186.000,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	31.577.200,00	31.577.200,00	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	76.608.800,00	76.608.800,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.910.487.670,00	1.910.487.670,00	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	99.582.400,00	99.582.400,00	0,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	45.255.700,00	45.255.700,00	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	54.326.700,00	54.326.700,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.810.905.270,00	1.810.905.270,00	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.810.905.270,00	1.810.905.270,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	341.550.000,00	341.550.000,00	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	341.550.000,00	341.550.000,00	0,00
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	341.550.000,00	341.550.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.160.853.434,00	2.279.879.733,00	119.026.299,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.823.656.534,00	1.957.239.040,00	133.582.506,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	558.367.934,00	691.950.440,00	133.582.506,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.265.288.600,00	1.265.288.600,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	337.196.900,00	322.640.693,00	-14.556.207,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	241.539.475,00	224.020.980,00	-17.518.495,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	95.657.425,00	98.619.713,00	3.022.308,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	48.830.100,00	48.830.100,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	48.830.100,00	48.830.100,00	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	48.830.100,00	48.830.100,00	0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	29.914.389,00	29.914.389,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	29.914.389,00	29.914.389,00	0,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	29.914.389,00	29.914.389,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.165.000.000,00	4.165.000.000,00	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.165.000.000,00	4.165.000.000,00	0,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.165.000.000,00	4.165.000.000,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.232.238.127,00	81.475.066.243,00	242.828.116,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	81.232.238.127,00	81.475.066.243,00	242.828.116,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.681.470.897,00	80.924.299.013,00	242.828.116,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.343.600.909,00	5.185.612.013,00	-158.088.896,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	7.637.529.308,00	7.863.778.320,00	226.249.012,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	67.388.687.700,00	67.743.355.700,00	374.668.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	33.652.980,00	33.652.980,00	0,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	298.000.000,00	298.000.000,00	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	550.767.230,00	550.767.230,00	0,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	492.500.000,00	492.500.000,00	0,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	58.267.230,00	58.267.230,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	82.393.191.157,00	85.860.000.293,00	3.466.809.136,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	72.973.061.939,00	76.439.871.075,00	3.466.809.136,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	70.783.061.939,00	74.053.871.075,00	3.270.809.136,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	57.328.561.939,00	58.149.371.075,00	820.809.136,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	13.454.500.000,00	15.904.500.000,00	2.450.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.190.000.000,00	2.386.000.000,00	196.000.000,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	2.190.000.000,00	2.386.000.000,00	196.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.357.496.050,00	8.357.496.050,00	0,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.499.338.550,00	6.499.338.550,00	0,00
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	6.309.338.550,00	6.309.338.550,00	0,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.478.157.500,00	1.478.157.500,00	0,00
5.2.04.02.06.0001	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.478.157.500,00	1.478.157.500,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.062.633.168,00	1.062.633.168,00	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.062.633.168,00	1.062.633.168,00	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.062.633.168,00	1.062.633.168,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.412.219,00	0,00	-35.412.219,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	35.412.219,00	0,00	-35.412.219,00
5.2.05.01.04	Belanja Modal Musik	35.412.219,00	0,00	-35.412.219,00
5.2.05.01.04.0002	Belanja Modal Musik Lainnya	35.412.219,00	0,00	-35.412.219,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.638.787.234,00</b>	<b>5.564.765.780,00</b>	<b>-2.074.021.454,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.638.787.234,00	5.564.765.780,00	-2.074.021.454,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.638.787.234,00	5.564.765.780,00	-2.074.021.454,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.638.787.234,00	5.564.765.780,00	-2.074.021.454,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.638.787.234,00	5.564.765.780,00	-2.074.021.454,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>234.539.862.600,00</b>	<b>234.539.862.600,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.763.044.000,00	5.763.044.000,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.417.000.000,00	5.417.000.000,00	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.417.000.000,00	5.417.000.000,00	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.417.000.000,00	5.417.000.000,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	346.044.000,00	346.044.000,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	346.044.000,00	346.044.000,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	346.044.000,00	346.044.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	228.776.818.600,00	228.776.818.600,00	0,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
5.4.02.01.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	228.776.818.600,00	228.776.818.600,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	228.776.818.600,00	228.776.818.600,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	151.802.945.000,00	151.802.945.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	76.973.873.600,00	76.973.873.600,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.437.116.577.846,00</b>	<b>1.453.147.105.496,00</b>	<b>16.030.527.650,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-33.232.722.717,00</b>	<b>-37.400.000.000,00</b>	<b>-4.167.277.283,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>6.767.277.283,00</b>	<b>2.600.000.000,00</b>	<b>-4.167.277.283,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>33.232.722.717,00</b>	<b>37.400.000.000,00</b>	<b>4.167.277.283,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkanaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

Kab. Landak, 22 Mei 2024

Pj. BUPATI LANDAK

TTD

SAMUEL